

BAB II

TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

Di awal abad ke-21 isu dan praktik globalisasi dan liberalisasi makin mencuat berbagai keputusan lembaga ekonomi internasional seperti WTO, telah mendorong laju globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia. Banyak kontroversi yang sekarang masih menjadi perdebatan antara negara maju dan negara berkembang di satu sisi negara-negara maju menghendaki negara berkembang membuka akses pasar bagi produk negara maju, namun di sisi lain negara maju melakukan proteksi terhadap produk pertanian mereka melalui subsidi yang relatif besar. Hal ini menimbulkan kecenderungan bahwa globalisasi dan liberalisasi ekonomi lebih memberikan peluang yang lebih baik bagi negara maju dibandingkan dengan negara berkembang.

Indonesia sebagai anggota masyarakat dunia perlu juga berkepentingan dengan isu globalisasi dan liberalisasi terlebih lagi kepentingan untuk memajukan perekonomian nasionalnya. Indonesia dan Negara berkembang perlu melakukan berbagai usaha termasuk *lobby* ke berbagai lembaga dan Negara maju agar keadilan dan keseimbangan pasar dalam perekonomian dunia dapat tercapai sehingga kebijakan pembangunan industri nasional mampu mengantisipasi serta selaras dengan perkembangan dunia masa depan. Indonesia saat ini menghadapi dua masalah serius sekaligus. Pertama, Indonesia masih dalam proses pemulihan ekonomi sehingga hasil ekspor sangat diharapkan dapat berperan sebagai sumber utama pembiayaan pemulihan ekonomi nasional

menggantikan peran dari pinjaman (utang) luar negeri (International Monetary Fund atau IMF).

Kedua pada waktu yang bersamaan era perdagangan bebas pun tiba yakni berlakunya Asean Free Trade Area (AFTA). Dan, tidak lama lagi World Trade Organization (WTO). Di era ini Indonesia dihadapkan pada persaingan yang sangat ketat dengan negara-negara lain. Tidak hanya dengan negara-negara yang sudah lama maju dalam perdagangan internasional, seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), dan Australia, tetapi juga dengan negara-negara berkembang yang pangsa pasar ekspornya terus meroket, seperti Republik Rakyat Cina (RRC), Vietnam, Malaysia, Thailand, dan India. Prospek ekspor Indonesia, khususnya nonmigas atau nonpertambangan, seperti manufaktur dan pertanian sangat ditentukan oleh tingkat daya saing dari produk-produk Indonesia relatif terhadap produk-produk yang sama dari negara-negara tersebut.

Maka dari itu Indonesia perlu melakukan berbagai kesepakatan dengan lembaga ekonomi internasional seperti IMF, WTO, APEC, ASEAN, Bank Dunia serta kesepakatan perjanjian multilateral dan bilateral baik yang masih berbentuk nota kesepahaman yang belum mengikat maupun yang sifatnya mengikat (*binding*) isu utama adanya kesepakatan internasional adalah daya saing ekonomi industri nasional, sehingga Indonesia siap tidak siap harus menyamai daya saing dengan Negara lain hal ini dilakukan agar industri tidak mati di pasar internasional Dalam kerangka multilateral lainnya, Peluang di bidang perdagangan luar negeri terbuka luas dengan adanya preferensi perdagangan yang sifatnya unilateral dari negara maju kepada

negara berkembang dalam rangka *Generalized System of Preferences (GSP)* dan adanya kesepakatan negara berkembang anggota *Global System of Trade Preferences among Developing Countries (GSTP)* untuk saling memberikan preferensi perdagangan yang saling menguntungkan.

2.1. Posisi Perdagangan Indonesia dengan ASEAN 1996-2001

1. Selama periode tahun 1996-2001, rata-rata impor Indonesia dari Dunia sebesar USD 34,0 milyar, dan impor dari ASEAN sebesar USD 5,3 milyar atau sebesar 15,8% dari total impor.
2. Selama periode tahun 1996-2001, rata-rata ekspor Indonesia ke Dunia sebesar USD 53,5 milyar, dan ekspor ke ASEAN sebesar USD 9,2 milyar atau sebesar 17,2% dari total ekspor.
3. Selama tahun 1996-2001, ekspor Indonesia ke ASEAN meningkat rata-rata 2,73% per tahun, sedangkan impor Indonesia dari ASEAN menurun rata-rata -0,32% per tahun.

Secara umum data diatas menunjukkan bahwa posisi perdagangan Indonesia di ASEAN adalah mantap. Tabel perdagangan ekspor dan impor Indonesia ke/dari negara-negara ASEAN dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2.

Tabel 2.1

**Perdagangan Ekspor Indonesia ke ASEAN
Tahun 1996 - 2001
(dalam US\$ juta)**

Negara	Ekspor						Pangsa	Pertumbuhan rata-rata (%)
	1996	1997	1998	1999	2000	2001		
Brunei D	29,02	38,14	35,66	27,63	25,51	21,61	0,23	-5,73
Laos	0,72	0,85	1,81	1,69	0,88	1,44	0,01	14,87
Malaysia	1.196,39	1.473,35	1.358,47	1.335,94	1.971,84	1.778,63	18,71	8,25
Myanmar	86,78	137,78	167,34	74,33	64,75	68,98	0,72	-4,49
Philippines	725,03	744,4	707,38	694,69	819,53	814,78	8,57	2,36
Singapore	4.952,79	5.230,85	5.718,28	4.930,51	6.562,38	5.363,83	56,42	1,61
Thailand	889,46	794,97	942,50	812,7	1.026,46	1.063,62	11,19	3,64
Vietnam	358,03	365,26	350,61	331,6	360,64	322,05	3,39	-2,09
Cambodia	71,93	65,36	64,69	69,19	51,68	72,13	0,76	0,05
Total ASEAN	8.310,15	8.850,96	9.346,74	8.278,28	10.883,67	9.507,07	100,00	2,73

Sumber : Pusdatin Depperindag, diolah.

Pada tahun 1996 perdagangan ekspor Indonesia ke ASEAN khususnya Malaysia sebesar 1.196,39 US\$ juta, pada tahun 1997 sebesar 1.473,35 US\$ juta, pada tahun 1998 sebesar 1.358,47 US\$ juta, pada tahun 1999 sebesar 1.335,94 US\$ juta, pada tahun 2000 sebesar 1.971,84 US\$ juta, dan pada tahun 2001 sebesar

1.778,63 US\$ juta. Dimana pertumbuhan rata-ratanya (persentase) yaitu tumbuh sebesar 8,25 dan pangsa pasarnya sebesar 18,71 %.

Tabel 2.2

**Perdagangan Impor Indonesia dari ASEAN
Tahun 1996 - 2001
(dalam US\$ juta)**

Negara	Import						Pangsa	Pertumbuhan rata-rata (%)
	1996	1997	1998	1999	2000	2001		
Brunei D	0,80	6,60	0,18	37,66	16,47	37,14	0,68	115,45
Laos	0,30	0,70	0,40	0,11	1,16	0,20	0,004	-7,79
Malaysia	880,30	864,80	626,63	605,64	1.128,77	1.005,46	18,41	2,69
Myanmar	35,10	19,00	9,14	19,33	21,98	20,83	0,38	-9,91
Philippines	111,50	127,00	65,00	55,50	114,73	93,85	1,72	-3,39
Singapore	3.087,00	3.410,90	2.542,82	2.525,95	3.788,69	3.147,05	57,61	0,39
Thailand	1.217,40	866,70	841,95	933,39	1.109,06	986,05	18,05	-4,13
Vietnam	214,00	117,30	420,53	604,55	303,31	171,30	3,14	-4,35
Cambodia	2,80	0,10	0,09	1,43	0,66	0,13	0,003	-45,88
Total ASEAN	5.549,20	5.413,10	4.506,38	4.783,56	6.484,83	5.462,01	100,00	-0,32

Sumber : Pusdatin Depperindag, diolah.

Perdagangan import indonesia dari ASEAN khususnya ke Malaysia dari tahun 1996 sampai dengan 2001, yaitu pada tahun 1996 sebesar 880,30 US\$ juta, pada tahun 1997 sebesar 864,80 US\$ juta, pada tahun 1998 sebesar 626,63 US\$ juta, pada tahun 1999 sebesar 605,64 US\$ juta, pada tahun 2000 sebesar 1.128,77 US\$ juta, dan

pada tahun 2001 sebesar 1.005,64 US\$ juta. Dimana pertumbuhan rata-ratanya (persentase) yaitu tumbuh sebesar 2,69 dan pangsa pasarnya sebesar 18,41 %.

2.2. Perkembangan Perdagangan Bilateral Indonesia dan Malaysia

Dengan sikap tidak mengikuti program paket pemulihan ekonomi versi Dana Moneter Internasional, ternyata telah memotivasi Pemerintah Malaysia menjadi lebih inovatif dan kreatif dalam mencari cara terbaik keluar dari krisis. Salah satu pilihan kebijakan strategis yang dilakukan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad adalah mematok nilai tukar mata uang setempat menjadi 380 ringgit per dollar AS. Hasilnya sungguh nyata. Masyarakat Malaysia benar-benar menikmati suasana ekonomi yang menyenangkan. Kalangan pelaku usaha langsung "beringas" membeli saham-saham perusahaan di berbagai negara. Nilai transaksi perdagangan mata uang dollar AS ke ringgit yang pada Agustus 1997 masih 20,2 miliar dollar AS langsung meningkat menjadi 22,9 miliar dollar AS pada Oktober tahun yang sama. Lalu, pada Januari 1998 melonjak hingga 32 miliar dollar AS. Bahkan, Petronas (Pertamina-nya Malaysia), misalnya, secara bertahap sejak 1996 telah membeli 100 persen saham Engen Petroleum senilai 580 juta dollar AS, lalu menjual lagi 20 persen saham kepada pihak lain. Engen merupakan perusahaan minyak terpadu kedua terbesar di Afrika Selatan. Engen juga memiliki sejumlah anak perusahaan di Bostwana, Ghana, serta mengontrol Energy Afrika, perusahaan minyak di Afrika Barat.

Saat yang sama, Telekom Malaysia makin agresif melakukan ekspansi global. Dengan menggandeng SBC Communication dari Amerika Serikat, keduanya

membeli 30 persen saham Telekom Afrika Selatan senilai 1,3 miliar dollar AS. Selain itu, MOL.com Bhd, anak perusahaan Berjaya Group di Malaysia, ikut menanamkan saham senilai 1,5 juta dollar AS di sebuah perusahaan pencipta sistem pelatihan yang berbasis web, yang berbasis di Atlanta. Gerilya investasi global tersebut dilakukan pula di Inggris dan Australia, yang mengandalkan hubungan sejarah masa silam sebagai daerah bekas jajahan Inggris. Lalu, ke India dan Sri Lanka yang banyak dilakukan warga Malaysia keturunan India. Demikian juga ke Cina, juga digalakkan masyarakat keturunan Tionghoa setempat.

"Nyali besar yang diperlihatkan pelaku usaha Malaysia ini tidak terlepas dari dukungan, sokongan, dan dorongan dari pemerintah setempat. Bahkan, menteri terkait memimpin langsung tim misi investasi dan perdagangan ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Inilah keunggulan Malaysia," kata Abdul Razak, pengusaha Malaysia yang pernah berinvestasi di Indonesia. Melihat kenyataan itu, Bank Dunia meramalkan perekonomian Malaysia akan mulai pulih pada tahun 1999 dengan pertumbuhan sebesar 2 persen. Ramalan ini ternyata benar. Sejak tahun 1999, pertumbuhan ekonomi negara tersebut merangkak naik dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dikeluarkan Departemen Statistik Malaysia, Desember 2002, pertumbuhan produk domestik riil pada kuartal ketiga tahun 2002 mencapai 5,6 persen. Padahal, pada kuartal dua tahun yang sama masih sebesar 3,9 persen dan kuartal satu baru 1,1 persen. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tahunan Malaysia selama sembilan bulan pertama 2002 mencapai 3,5 persen. Pertumbuhan

yang cukup tinggi itu banyak didukung adanya peningkatan permintaan domestik dan ekspor. Selain itu, juga karena adanya stimulus fiskal dan moneter dari Pemerintah Malaysia, serta harga komoditas meningkat. Perkembangan lain adalah adanya pertumbuhan akumulasi modal tetap sebesar 2,6 persen dalam kuartal ketiga tahun 2002. Tak heran, pertumbuhan ekonomi Malaysia selama 2002 sangat positif dalam semua sektor. Sektor industri manufaktur naik sebesar 7,3 persen dan jasa 3,4 persen. Perkembangan sektor manufaktur dipacu penampilan yang baik sektor industri berorientasi ekspor yang mengalami pertumbuhan sebesar 11,2 persen pada kuartal ketiga. Padahal, pada kuartal kedua 2002 masih 6 persen. Pertumbuhan produksi elektronik juga mencapai 20,4 persen, sedangkan ekspor produk kelistrikan mencapai 0,6 persen setelah selama empat kuartal berturut-turut mencapai pertumbuhan yang negatif.

Sementara itu, industri yang berbasis domestik juga mengalami pertumbuhan yang cukup moderat, yakni 1,8 persen pada kuartal ketiga 2002. Kendati demikian, pertumbuhan ini sedikit menurun dibandingkan dengan kuartal kedua yang mencapai 8,2 persen. Penurunan itu merupakan dampak dari kebijakan pengusiran terhadap pekerja asing ilegal secara besar-besaran dari Malaysia pada Maret hingga September 2002 sehingga mengakibatkan krisis tenaga kerja di sektor konstruksi yang luar biasa. Sadar akan kondisi perekonomian yang belum stabil, selama tahun 2002, Pemerintah Malaysia mengeluarkan berbagai kebijakan bidang ekonomi. Langkah itu sebagai stimulus dalam menghadapi perkembangan ekonomi dunia yang masih diliputi

berbagai ketidakpastian. Dengan demikian, sektor publik memegang peranan sebagai katalisator pembangunan. Stimulus yang berupa paket insentif pajak itu ditujukan selain bisa mendorong tingkat konsumsi masyarakat, juga untuk meningkatkan dan mempertahankan aneka pertumbuhan ekonomi, termasuk menciptakan kestabilan sosial, serta memperkuat daya saing Malaysia dalam menghadapi persaingan ekonomi global.

Paket pajak itu antara lain pengurangan pajak pendapatan individu dan pengurangan atau penghapusan pajak impor terhadap beberapa jenis barang. Kebijakan ini selain bertujuan mengurangi ongkos produksi, juga untuk mengurangi biaya dalam berbisnis di Malaysia. Pemerintah Malaysia pun menurunkan kriteria nilai tambah dari 30 persen menjadi 20 persen untuk mendapatkan keringanan pajak menggunakan status pionir. Bahkan, dilakukan penghapusan pajak selama lima tahun bagi perusahaan yang melakukan reinvestasi dalam sektor pertanian. Di samping itu, diberikan keringanan pajak terhadap peralatan pendidikan, termasuk alat laboratorium bahasa, bengkel kerja, dan studio. Selain itu, ditutup defisit anggaran dari sumber-sumber keuangan dalam negeri yang bersifat non-inflationer sebesar 59,8 persen dari total pinjaman pemerintah. Ini berarti utang dalam negeri Pemerintah Malaysia mencatat kenaikan 77,6 persen dari total pinjaman 1.676.835.000 ringgit. Masyarakat juga terus-menerus didorong untuk menabung sebab dengan nilai tabungan yang semakin tinggi, itu memberi peluang bagi pemerintah menekan pinjaman luar negeri pada tingkat yang cukup rendah. Kini, total pinjaman luar negeri sebanyak 183,909

juta ringgit atau 51,7 persen dari gross domestic product (GDP) sehingga Malaysia termasuk peringkat negara berutang menengah. Sepertinya Pemerintah Malaysia menyadari pembangunan ekonomi tidak cukup hanya dengan mendorong pengusaha besar, tetapi harus memberi tempat yang istimewa juga kepada kelompok usaha kecil dan menengah (UKM). Sadar atau tidak, UKM selalu memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi domestik. Penguatan ekonomi domestik merupakan pilihan penting guna meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus meminimalisasi ketergantungan terhadap impor dan pinjaman luar negeri. Untuk itu, berbagai stimulus mulai diberikan, seperti pemberian suku bunga kredit yang rendah, yakni rata-rata di bawah 10 persen per tahun.

Semua lembaga keuangan pun diwajibkan mengalokasikan dana sekaligus memberikan pinjaman bagi UKM yang sebanyak-banyaknya. Bahkan, birokrasi yang menghambat proses perizinan dalam pendirian badan usaha dan permohonan kredit dipangkas habis sehingga pelaku UKM dengan mudah mendapatkan akses. Kebijakan ini membuat antusiasme masyarakat menggeluti UKM cukup tinggi. Untuk Bank Pertanian Malaysia (BPM), misalnya, hingga awal Juni 2003 telah menerima permohonan kredit dari 7.135 pemohon dengan jumlah pinjaman sebesar 110 juta ringgit Malaysia. Sebanyak 2.914 pemohon sudah dikabulkan dengan nilai kredit 39,19 juta ringgit. Bank Simpanan Nasional (BSN) menerima permohonan kredit dari 1.841 pemohon dengan total nilai 32,1 juta ringgit. Total dana kredit UKM yang dialokasikan BSN pada 2003 senilai 300 juta ringgit, sedangkan BPM sebanyak 500

ringgit. Dengan langkah tersebut, investasi swasta diperkirakan dapat meningkat 16,5 persen, lalu tingkat konsumsi naik 9,9 persen. Bahkan, pertumbuhan ekonomi negara itu pada tahun 2003 diperkirakan mencapai minimal 4,5 persen. Peningkatan tersebut diyakini akan terjadi pada semua sektor perekonomian dengan dimotori peran swasta dan peningkatan permintaan domestik. Perkiraan itu juga didasarkan pada asumsi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2003, yang diproyeksikan meningkat mencapai 3,7 persen dan perdagangan 6,6 persen. Kemudian, didukung estimasi pertumbuhan ekonomi AS sekitar 2,5 persen dan Eropa 2,9 persen. Demikian pula Jepang yang masih mengalami resesi diyakini akan mampu keluar dari lingkaran itu dengan pertumbuhan sekitar 1,1 persen. Oleh karena itu, sektor industri manufaktur diharapkan dapat menjaga momentum yang positif dengan mencapai pertumbuhan 8,5 persen. Jika hal itu terwujud, diyakini mampu memberikan kontribusi 2,6 persen terhadap GDP Malaysia. Sektor jasa diperkirakan akan mencatat peningkatan 5,9 persen. Andaikan terwujud, berarti sektor ini bakal tetap menjadi kontributor utama GDP Malaysia, yakni sebesar 3,3 persen.

Sektor konstruksi juga diyakini berkembang pesat dengan tingkat pertumbuhan 4,5 persen, sedangkan pertanian dan pertambangan kemungkinan juga mengalami hal yang sama. Namun, pertumbuhan masih relatif kecil, yakni sebesar 3,4 persen dan 2,5 persen. Memang, semua angka yang disebutkan bukanlah merupakan suatu kepastian. Perjalanan waktu selalu saja timbul berbagai hambatan. Misalnya, wabah SARS serta invasi AS ke Irak berdampak buruk terhadap

perkembangan bisnis dan investasi di hampir semua negara. Akan tetapi, kini kedua malapetaka itu berangsur pulih, sedangkan waktu yang tersisa untuk 2003 masih enam bulan lagi. Apalagi, didukung dengan stabilisasi politik dan keamanan, serta supremasi hukum benar-benar terjaga. Oleh sebab itu, prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia 2003 diperkirakan takkan bergeser jauh dari yang ditargetkan. Keyakinan yang kuat itu, menurut Zainal Abidin, pengusaha di Kuala Lumpur, karena pergerakan perekonomian terjadi pada semua sektor. Kondisi ini didukung lagi dengan adanya likuiditas dana yang mencukupi di semua perbankan Malaysia. Jumlah kredit yang disalurkan pun terus meningkat berkisar 3,3 persen sampai 4 persen per bulan dengan dominasi pada pembelian rumah dan mobil, yakni sekitar 45 persen. "Pengajuan kredit untuk membeli rumah dan mobil berarti menunjukkan telah ada peningkatan pendapatan dalam masyarakat. Adanya peningkatan pendapatan itu merupakan hasil dari kegiatan ekonomi yang cukup signifikan," tegas Abidin.

"Melihat perkembangan ekonomi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir cukup positif, yakni empat persen. Kami sangat yakin target pertumbuhan ekonomi Malaysia sebesar 4,5 persen pada 2003 pasti tercapai," ujar Menteri Keuangan Malaysia Chan Kong Choy, seperti dikutip harian Ekonomi di Kuala Lumpur edisi 23 Juni 2003. Harus diakui Malaysia telah beberapa langkah lebih maju dan ketertinggalan itu semakin sulit dikejar Indonesia. Semuanya ini dimungkinkan oleh stabilitas sosial politik, keamanan, serta kepastian hukum, dan lebih dari itu, pemerintah setempat juga memiliki ambisi, visi, program, serta strategi yang terarah

dan terpadu. Semua elite politik negara itu selalu memiliki satu bahasa: memberantas korupsi, menegakkan keadilan, membuka lapangan kerja melalui investasi sektor swasta dan meningkatkan pendapatan, sekaligus kesejahteraan rakyat. Tekad dan komitmen seperti itu yang mulai kering dan gersang dalam sanubari penguasa dan elite politik di Indonesia. Berpolitik praktis bukan lagi sebagai wahana membebaskan rakyat dari segala belenggu kemiskinan dan kebodohan, lalu mengantar mereka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Akan tetapi, hanya upaya untuk memperkaya diri dan kelompok kaum elite politik. (JANNES EUDES WAWA, 04 Juli 2003 : Kompas)

